

BAB III

HEGEMONI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

A. Hubungan Iran Dengan Amerika Serikat

Pada masa kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS), terdapat hal yang menarik berkenaan dengan rencana pemerintahan George W. Bush yang akan menempatkan kembali perwakilan AS di Iran. Tentu saja rencana ini menyedot perhatian banyak pihak baik domestik maupun internasional. Khalayak domestik AS, khususnya pihak Partai Demokrat, berpandangan bahwa usulan pemerintahan Bush yang berasal dari Partai Republik tersebut sebagai upaya untuk meredam kelemahan kampanye Partai Republik yang notabene kerap kedodoran dan cenderung tak berdaya dalam menanggapi kritikan pedas dari Partai Demokrat berkaitan dengan kegagalan pemerintahan Bush dalam pembangunan kembali Irak dan perseteruannya dengan Iran.

Sementara, masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang tergabung dalam *coalition of the willing* pimpinan AS, terhenyak dan cenderung tak percaya dengan sikap pemerintahan Bush yang berubah drastis dalam menghadapi Iran. Bush menyebut negara Iran sebagai bagian dari negara-negara poros setan (*axis of evils*) bersama-sama dengan Irak dan Korea Utara. Fakta menunjukkan ternyata konstituen pemilih pilpres AS tetap tak bergeming. Mereka cenderung melihat usulan Bush itu justru malah makin membuka aib kegalan diplomasi AS dalam perselisihannya dengan Iran. Hal itu juga berdampak pada keutuhan *coalition of the willing*.

Kini beberapa negara sekutu AS mulai bersuara untuk menarik pasukannya di Irak. Itu berarti pukulan pahit bagi pemerintahan Bush di akhir masa kepemimpinannya. Padahal, masih segar dalam ingatan, perkembangan strategis di Timur Tengah pada awal tahun 2008 sangat mempengaruhi *State of the Union* dari Presiden Bush. Walaupun ditentang keras oleh kalangan DPR yang mayoritas dikuasai Partai Demokrat, pemerintahan Bush tetap bersikukuh memperkuat keberadaan kekuatan militer AS di Irak untuk mencegah dukungan Iran bagi para milisi Irak.

Selaras dengan kebijakan Bush ini, beberapa waktu kemudian Menteri Luar Negeri AS Condoleeza Rice melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara sekutu AS di Timur Tengah termasuk Israel untuk membicarakan kemungkinan implementasi lebih lanjut dari kebijakan Bush tersebut. Secara lugas, dalam kunjungannya ke Israel, Rice menyatakan bahwa salah satu opsi yang dibicarakan adalah kemungkinan melakukan serangan militer ke Iran.

Kondisi konflik AS-Iran yang awalnya hanya perang retorika menjadi penggelaran kekuatan militer dan diplomasi. AS berposisi untuk tidak melakukan kompromi dengan Iran sebagai salah satu negara poros setan (*axis of evil*) teroris. Kompromi dengan teroris berarti suatu pukulan memalukan bagi martabat Amerika Serikat.

Di akhir periode pemerintahannya, Presiden Bush tampaknya menyadari bahwa nasib politiknya boleh jadi terjalin dengan kelangsungan keterlibatan AS dalam konflik di Timur Tengah, khususnya di Teluk Persia baik konflik dengan

bawah AS. Namun, para pejuang di Iran tidak menyandarkan secara penuh kekuatan militer Iran pada kekuatan teknologi militer semata. Dua dekade terakhir ini para pejuang menekankan pada mobilisasi pembangunan *national and character building* bangsa Iran. Mobilisasi para pejuang ini telah teruji dalam perang Iran-Irak, membangun ekonomi, politik, dan militer nasional secara mandiri.

Kaitannya dengan peperangan militer, maka *jihad fii sabilillah* adalah pijakan hakiki bagi setiap insan militer Iran dalam melawan agresor negara luar, dan terdapat kemungkinan “perang suci” akan terjadi di banyak negara-negara Timur Tengah yang memiliki penduduk militan beragama Islam aliran Syiah. Para simpatisan Iran di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah akan menyerang semua kepentingan-kepentingan AS dan Eropa. Itu berarti pukulan mematikan bagi AS. Dengan kata lain, ini menunjukkan karakter musuh yang jauh berbeda dengan musuh-musuh AS sebelumnya.

Selama masa pemerintahan Ahmadinejad, Iran tidak melakukan hubungan diplomatik baik dengan AS maupun Israel. Di lain pihak, Iran semakin menjalin hubungan baik dengan Rusia. Kedua negara ini bekerjasama dalam bidang nuklir serta memiliki keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah bersama yang terkait dengan Laut Kaspai. Ahmadinejad meningkatkan jaringannya dengan pemimpin-pemimpin dunia yang menentang hegemoni AS seperti Hugo Chavez dari Venezuela.

Di kawasan regional, Iran mengupayakan perdamaian dengan negara-

bilateral dan memposisikan diri bergabung dengan Dewan Kerjasama Teluk (*Gulf Cooperation Council*). Iran bahkan berhubungan baik dengan Syria dimana kedua negara sama-sama berhadapan dengan isolasi regional dan internasional. Lebih jauh lagi, pemerintahan Ahmadinejad menjalin hubungan baik dengan Afghanistan dan Pakistan. Secara monumental Ahmadinejad membangun "pipa saluran damai" dari Iran ke Pakistan dan India. Diharapkan pipa saluran damai ini dapat meningkatkan perekonomian Asia Selatan dan meredakan ketegangan diantara Pakistan dan India. Puncak gebrakan Ahmadinejad terjadi bulan Maret 2008. Dia menjadi Presiden Iran Pertama yang mengunjungi Irak sejak tahun 1979. Kunjungan dua hari Ahmadinejad ke Irak ini merupakan upaya mempererat hubungan kedua negara dan mempertajam kritiknya terhadap pendudukan AS.

Pada hakikatnya keseluruhan aktivitas diplomatik Ahmadinejad di atas merupakan implementasi dari tujuh prinsip kebijakan luar negeri Iran yakni: menolak segala bentuk dominasi; mempertahankan kemerdekaan dan seluruh wilayah; mempertahankan hak-hak umat Islam; tidak memihak satu blok sebagaimana semboyannya "*laaa syarqiyyah wa laa ghorbiyyah* (tidak Timur dan tidak Barat); berdamai dengan negara-negara yang tidak agresif; menganggap kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sebagai hak-hak universal; dan mendorong setiap perjuangan kaum *mustadh'afin*, tetapi menahan diri dari segala bentuk intervensi.

Berpijak pada muatan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Iran di atas, tampaknya Iran tidak akan begitu saja menerima usulan Bush untuk menempatkan perwakilannya di Teheran karena niat itu datang dari satu pihak saja yakni AS

tanpa ada negosiasi dulu dengan elit politik Iran. Hal itu diperkuat dengan pernyataan politik pemerintahan Bush yang beberapa hari sebelumnya berupaya memaksa kembali Iran agar tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1737. Sejarah menyatakan bahwa ternyata Iran tetap tidak mau tunduk pada resolusi DK PBB itu yang notabene sangat didominasi kepentingan Amerika Serikat (AS).

B. Perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) Iran

Perjanjian Non Proliferasi Nuklir merupakan suatu perjanjian yang membatasi kepemilikan senjata nuklir. Sebagian besar negara berdaulat mengikuti perjanjian ini, tahun 1995 sudah lebih dari 170 negara sepakat untuk melanjutkan perjanjian ini tanpa batas waktu dan tanpa syarat. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

1. Non Proliferasi

Terdapat 5 negara yang diperbolehkan NPT untuk memiliki senjata nuklir, yaitu Perancis (1992), Republik Rakyat Cina (1992), Uni Soviet (1986, kewajiban dan haknya diteruskan oleh Rusia), Inggris (1968), dan Amerika Serikat (1968). Hanya 5 negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian ini mulai dibuka, dan juga termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Lima negara pemilik senjata nuklir (*Nuclear Weapon States*) ini setuju untuk tidak memberikan teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak

atau mengembangkan senjata nuklir. Kelima negara NWS tersebut telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS, kecuali untuk merespon serangan nuklir dan serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Namun persetujuan ini belum secara formal dimasukkan dalam perjanjian. Amerika Serikat telah mengindikasikan bahwa Amerika akan dapat menggunakan senjata nuklir untuk membalas penyerangan non-konvensional yang dilakukan oleh negara-negara yang dianggap berbahaya.

2. Perlucutan

Pasal VI dan Pembukaan perjanjian menerangkan bahwa negara-negara NWS berusaha mencapai rencana mengurangi dan membekukan nuklirnya. Pasal VI ini juga menyatakan bahwa perjanjian dalam hal perlucutan umum dan lengkap di bawah kendali internasional yang tegas dan efektif. Dalam pasal I, negara-negara pemilik senjata nuklir menyatakan untuk tidak mempengaruhi negara non nuklir manapun untuk mendapatkan senjata nuklir. Pasal X menyatakan bahwa negara manapun dapat mundur dari perjanjian jika dirasakan adanya keanehan, contohnya ancaman yang memaksa untuk keluar.

3. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.

Karena sangat sedikit dari negara-negara pemilik senjata nuklir dan pengguna energi nuklir yang mau membuang kepemilikan bahan bakar nuklir, pokok ketiga dari perjanjian ini memberikan negara-negara lainnya kemungkinan untuk melakukan hal yang sama, namun dalam kondisi-kondisi tertentu yang

negara, pokok ketiga perjanjian ini, yang memperbolehkan penambangan uranium dengan alasan bahan bakar merupakan sebuah keuntungan. Namun perjanjian ini juga memberikan hak pada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir untuk kepentingan damai, dan karena populernya pembangkit tenaga nuklir yang menggunakan bahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Pengembangan uranium secara damai dapat dianggap sebagai awal pengembangan hulu ledak nuklir, dan ini dapat dilakukan dengan cara keluar dari NPT. Tidak ada negara yang diketahui telah berhasil mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, jika dalam pengawasan NPT.

Negara-negara yang telah menandatangani perjanjian ini sebagai negara non senjata nuklir dan mempertahankan status tersebut memiliki catatan baik untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Di beberapa wilayah, fakta bahwa negara-negara tetangga bebas dari senjata nuklir mengurangi tekanan sebagai negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir sendiri, biarpun negara tersebut diketahui memiliki program tenaga nuklir damai yang bisa memicu kecurigaan. Setiap negara memiliki hak melakukan penelitian teknologi nuklir namun hanya untuk digunakan sebagai sumber energi listrik alternatif ataupun keperluan sipil lainnya diluar kepentingan militer atau kegiatan produksi persenjataan. NPT memiliki keanggotaan yang sifatnya universal, yaitu terbuka

Iran tergabung dalam anggota NPT pada tahun 1958 dan resmi menjadi anggota NPT dengan menandatangani perjanjian tersebut. Iran menyatakan bahwa didalam mengembangkan teknologi nuklirnya hanya untuk tujuan damai, sehingga dapat dikatakan Iran tidak melanggar ketentuan dari NPT. Untuk dapat membuktikan bahwa Iran dalam pengembangan nuklirnya memiliki kepentingan militer, dibutuhkan analisa yang cukup kuat dalam penelitian dan pengembangan fasilitas nukir di Iran. Sebagai negara yang ikut meratifikasikan NPT, Iran tetap memiliki hak untuk melakukan pengembangan infrastruktur teknologi nuklirnya tanpa adanya suatu hambatan. Dengan ini Iran juga telah berkomitmen terhadap dunia internasional untuk terus menegakkan hak negaranya untuk mengembangkan teknologi nuklir.

C. Upaya-Upaya Hegemoni AS

Berakhirnya perang dingin telah membawa perubahan sistim perpolitikan dunia, dari sistem internasional yang didominasi dua negara super power menjadi didominasi oleh satu kekuatan saja. Perubahan sistem ini telah mengakibatkan perubahan pola interaksi antar negara. Hal tersebut membawa negara-negara, terutama major powers merubah kebijakan luar negerinya. Perubahan sistim juga memberikan konsekuensi bagi tatanan dan stabilitas di dunia.

Hal yang penting dari politik internasional kontemporer adalah lanjutan dari tidak proporsionalnya posisi dimana Amerika Serikat menganggap bahwa stabilitas di Timur Tengah merupakan hal yang vital dan mereka mengadopsi strategi hegemoni untuk mempromosikan regional order guna melavani

kepentingan Amerika. Pengaruh AS yang paling dominan dalam sistem internasional yang baru . AS tidak menemukan lagi saingan yang berarti dan menjelma sebagai kekuatan politik yang besar. Dengan kekuatan militer dan perekonomiannya, maka ideologi liberalis-kapitalismenya banyak diterima sebagian besar negara-negara di dunia.

Tidak ada negara yang dapat dalam mengimbangi AS sehingga mengakibatkan pasca Perang Dingin menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi wilayah di dunia termasuk di Timur Tengah. Dalam merespon tantangan yang dihadirkan oleh kekuatan dominan, AS telah mengejar strategi hegemoni untuk mempertahankan pengaruhnya. Strategi Hegemoni berarti mempengaruhi negara-negara di wilayah untuk tatanan internasional berdasarkan nilai dan interesnya. Setelah kejadian 11 September telah berdampak pada kebijakan luar negerinya. Serangan teroris telah merubah persepsi ancaman bagi AS, bahwa ancaman kepada kepentingan AS, bisa langsung mengenai pertahanan dalam negerinya, oleh karena itu, peran keamanan AS perlu ditingkatkan.

Hal lain dari institutionalisasi hegemoni AS adalah kehadiran militer AS. Menurut Joseph Nye dalam US Department of Defense tahun 2001 menyebutkan bahwa keberadaan dan komitmen militer AS di Timur Tengah tidaklah terbatas waktunya. Komitmen tersebut meliputi keberadaan Angkatan Bersenjata AS di Timur Tengah. Kehadiran angkatan bersenjata AS diperkuat dengan aliansi dengan Inggris, dan Perancis.

Menurut AS strategi hegemoninya telah berperan bagi terciptanya tatanan regional serta membantu peranan pengembangan major power dari rivalitas satu

sama lain seperti Iran. Sentimen negative kedua belah pihak tidak menyebabkan terjadinya eskalasi lebih lanjut, hanya terjadi di permukaan saja. Selain itu, AS juga dapat mengatur konflik regional yang dapat mengakibatkan terjadinya perang baik dalam skala lokal ataupun yang lebih luas. AS telah melakukan iniatif sekitar tahun 1990-an untuk menjaga kestabilan melalui diplomasi dan melakukan ancaman melalui kekuatan militer.

D. Kebijakan-Kebijakan AS di Timur Tengah

Hegemoni AS dan dominasi politik di Timur Tengah semakin meluas. Pada tanggal 30 April 1995, AS menyatakan akan memutuskan segala bentuk hubungan perdagangan dan investasi dengan Iran. AS juga tidak akan melakukan pembelian minyak kepada Iran yang mencapai 4 milyar dollar per tahun. Alasannya adalah karena Iran adalah salah satu negara yang sedang mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, AS juga membujuk dan menekan negara-negara lain untuk mengikuti jejaknya dalam mengucilkan Iran.

Konflik AS-Iran ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. AS masih menyimpan dendam terhadap kaum mullah yang berkuasa di Iran, karena AS pernah "dipermalukan" Iran. *Pertama*, tergulingnya Dinasti Pahlevi (1979) yang mengakibatkan hilangnya sekutu dan basis utama AS di kawasan Teluk Parsi. *Kedua*, kegagalan Gedung Putih dalam membebaskan sekitar 50 diplomat mereka yang disandera di Kedubes AS di Teheran (1980) yang menjadi salah satu sebab gagalnya Jimmy Carter terpilih sebagai presiden AS. *Ketiga*, terbongkarnya skandal "irangate" yaitu penjualan senjata AS secara rahasia ke Iran yang

keuntungannya disumbangkan kepada para pemberontak Contra di Nikaragua (1986) yang membuat Ronald Reagan (Presiden AS waktu itu) hampir diajukan ke pengadilan.

- Sejak berkuasanya kaum mullah di Teheran, tidak ada hubungan diplomatik antara AS dan Iran. Namun, hubungan ekonomi keduanya terus berlanjut. Bahkan AS disebut-sebut sebagai pembeli minyak Iran terbesar ketiga sesudah Jepang dan Jerman. Secara politis pun, hubungan kedua negara sebenarnya sudah mulai membaik, terutama sejak wafatnya Imam Khomeim dan tampilnya Rafsanjani yang dikenal sebagai tokoh mullah "*pragruatis*" sebagai presiden Iran. Pendekatan politik AS Iran tampak mulai intensif ketika Teheran mengambil posisi netral sewaktu berkobar Perang Teluk II, karena waktu itu Washington sangat khawatir jika Teheran ikut berperang di pihak Bagdad. Namun, hubungan kedua negara kembali mendingin akibat penolakan Iran terhadap kehadiran kekuatan militer AS dan sebaliknya, penolakan AS terhadap keikutsertaan Iran dalam pengaturan keamanan (*security arrangement*) di kawasan Teluk Parsi pasca Perang Teluk.

Puncak kemarahan Washington adalah sikap Teheran yang menentang proses perdamaian Arab-Israel yang disponsori AS. Pasalnya, posisi Iran sebagai "kekuatan menengah" di kawasan Timur Tengah semakin sulit untuk diabaikan. Setelah berakhirnya perang Iran-Irak (Perang Teluk I, 1980- 1988), Teheran secara diam-diam berhasil membangun kembali kekuatannya dan di bidang politik regional pun mereka secara perlahan-lahan berhasil memperbaiki

Mesir. Lebih dari itu, Teheran tengah berupaya membangun “poros” Iran-India-Cina guna menghadapi apa yang disebut sebagai “hegemonisme barat” (*western hegemonism*) di kawasan ini. Karenanya, bisa dimengerti jika AS kemudian merasa gusar dengan politik kaum mullah di Teheran.

Tuduhan AS bahwa Iran tengah mengembangkan senjata nuklir perlu dicegah. Di satu sisi, AS membiarkan Israel meningkatkan kemampuan nuklirnya, tapi disisi lain AS bertekad mencegah Iran (dan negara-negara Arab) agar tidak memiliki senjata pemusnah massal itu. Sikap AS itu justru membangkitkan antipati negara-negara sekutunya yang masih “memiliki harga diri” di kawasan ini. Mesir misalnya, kendati sudah berdamai dengan Israel, dan menjadi negara Arab penerima bantuan terbesar AS, namun menunjukkan keengganannya untuk menandatangani NPT selama Israel juga tidak mau melakukannya. Padahal AS terus-menerus melakukan tekanan terhadap Mesir, tapi sebaliknya mendukung sikap Israel yang menolak NPT sejumlah negara Arab lain sekutu AS pada akhirnya memang mau menandatangani NPT, namun Mesir tetap tidak bersedia mengubah pendiriannya. Berbeda dengan negara-negara Arab sekutu AS, Iran memang tidak mudah untuk diintimidasi begitu saja. Anehnya, kendati Teheran sudah bersedia menandatangani NPT, tapi Iran justru yang paling keras ditekan oleh AS. Padahal, menurut sebagian pakar Barat, kemampuan Iran sendiri untuk memproduksi senjata nuklir masih sangat diragukan.

Selain itu, AS selalu menuduh Iran sebagai sponsor terorisme walaupun belum sekali pun AS mampu membuktikannya. Tampaknya, AS selalu menuduh

..... mereka yang tidak mau mengikuti kebijakan politik mereka sebagai

pendukung terorisme. Selain Iran, contoh lainnya adalah Suriah. Selama ini, Suriah oleh AS dimasukkan dalam daftar pendukung terorisme. Ketika ikut mendukung AS dalam Perang Teluk II, Suriah dikeluarkan dari daftar itu. Namun, dalam daftar baru yang dikeluarkan AS, Suriah bersama Iran, Irak, Libya dan Sudan kembali dimasukkan sebagai pendukung terorisme. Hal ini karena sikap Suriah yang tidak mau tunduk pada kemauan AS agar berdamai dengan dan sesuai dengan prasyarat yang diajukan oleh Israel.

Ketika hampir seluruh rakyat dan pemimpin AS melampiaskan kemarahannya terhadap pemerintahan revolusioner Iran, berkenaan dengan terjadinya peristiwa penyanderaan 50 diplomat AS di gedung kedubes mereka di Teher, November 1979, ada sebuah joke menarik tapi secara substansia mengandung kebenaran yaitu: "Mengapa AS marah kepada Iran hanya karena 50 warganya disandera, tapi justru tidak berkutik menghadapi realita bahwa seluruh warga AS dari dulu hingga sekarang menjadi 'sandera' penguasa Israel." Oleh sebab itu, sebenarnya tidak terlalu mengejutkan jika AS, pada 17 Mei 1995, menjatuhkan hak vetonya terhadap sebuah rancangan resolusinya Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar Israe menarik kembali keputusannya yang menganeksasi 53 hektar Wilayah Palestina di Al-Quds (Yerusalem), kendati para anggota (tetap dan tidak tetap) DK PBB lainnya menyetujui rancangan resolusi itu. Dan karena menjadi "sandera" Israel itulah, AS cenderung akan selalu melindungi dan membenarkan apapun langkah yang ditempuh Tel Aviv, kendati hanya "melawan" opini serta tata krama politik internasional

Menurut doktrin *Israel first*, dasar utama dari kebijakan AS di Timur Tengah adalah mendukung dan melindungi kepentingan Israel. Karenanya, tidak akan sekali pun seorang presiden AS yang “berani” meninggalkan Israel. Itulah sebabnya mengapa Clinton mengeluarkan keputusan mengembargo Iran di depan kongres Yahudi dan kemudian menjatuhkan vetonya terhadap rancangan resolusi DK-PBB yang mengecam Israel yang juga tentu saja demi meraih dukungan dan simpati yang lebih luas dari kalangan Yahudi AS